

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, baik untuk bangsa, negara, maupun masyarakat, sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹ Pembangunan yang berkelanjutan perlu dimulai dari tingkat paling dasar, yaitu desa, karena keberhasilan pembangunan di tingkat desa sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya pembangunan yang merata, dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara masyarakat yang kaya dan miskin, serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.² Oleh karena itu, pembangunan desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, sejalan dengan poin ketiga Nawacita Presiden yang menggarisbawahi pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.³

Dalam rangka memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah menerbitkan undang-undang

¹ Jeane Neltje Saly dan Ermita Ekalia, 'Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), 1668–76.

² Nurul Sahara, Qomariyatus Sholihah, dan Firda Hidayati, 'Analisis Perencanaan Strategis Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)(Studi Pada Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10.1 (2024), 109– 20.

³ Muhammad Hilmi Adani, 'Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Dalam Sektor TTI (Trade, Tourism, Investment) Di Era Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019' (Universitas Islam Indonesia, 2023).

yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Salah satu bentuk implementasi dari undang-undang tersebut adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa, lembaga yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴

Melalui keberadaan BUMDes, desa dapat menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya lebih sejahtera. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang mengalami kesulitan dalam menjalankan BUMDes akibat minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dalam pengelolaan BUMDes, khususnya di Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, untuk mencapai tujuan desa mandiri dan sejahtera.⁵

Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi di tingkat desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalimaya di Desa Maja menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pada acara musyawarah desa yang diselenggarakan pada 30 Januari 2024 untuk laporan akhir tahun, Ahmad Rifa'i menyampaikan harapannya agar BUMDes Kalimaya dapat lebih mendalami berbagai peluang usaha ekonomi demi mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah. Saat ini, BUMDes Kalimaya telah mengelola empat unit

⁴ Sarkawi, 'Pemanfaatan Potensi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Daya Ungkit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5.1 (2020), 56–73.

⁵ Ana Sopanah, Reny Kurniwati, dan Dwi Anggarani, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (Pad) Berbasis Kearifan Lokal* (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2023).

usaha, termasuk penyewaan gedung olahraga dan gedung serbaguna. Keempat bidang usaha ini telah memberikan kontribusi positif yang cukup signifikan terhadap pemasukan desa, sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi desa secara bertahap.⁶

Ketua BUMDes Kalimaya, Budi Hermansah, melaporkan bahwa selama periode 2022-2023, BUMDes ini berhasil meraih laba lebih dari Rp 50 juta. Dari laba tersebut, Rp 25 juta dialokasikan sebagai laba bersih yang digunakan untuk kebutuhan operasional serta pemberian insentif kepada para pengurus. Meskipun pengelolaan yang berjalan saat ini merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya tanpa adanya tambahan modal baru, optimisme terhadap pengembangan usaha tetap ada. Melalui komitmen pengurus dan upaya dalam mengeksplorasi berbagai potensi usaha baru, BUMDes Kalimaya diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Maja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.⁷

BUMDes memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Melalui BUMDes, desa dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja serta mendorong berkembangnya kewirausahaan lokal yang berbasis pada potensi desa. BUMDes berfungsi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat pedesaan tidak hanya belajar, tetapi juga mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam menjalankan usaha. Dengan adanya dukungan ini, BUMDes membantu

⁶ Redaktur MK. "Kades Maja Minta Bumdes Kalimaya Berkembang." *Media Kreasi News*, 2024, <https://mediakreasinews.co.id/kades-maja-minta-bumdes-kalimaya-berkembang/>. Diakses pada 15 Oktober 2024.

⁷ Badan Usaha Milik Desa Kalimaya. (2024). Laporan Tahunan BUMDes Kalimaya 2024. Kabupaten Lebak Pemerintah Desa Kalimaya.

masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi, memperkuat daya saing mereka, dan mengurangi ketergantungan pada lapangan pekerjaan di luar desa.⁸ Keberadaan BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks ini, BUMDes bukan hanya sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat desa.⁹ Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan pengelolaan BUMDes yang ideal dan profesional agar dapat meningkatkan PADes dan, pada gilirannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Keberhasilan BUMDes dapat dilihat dari bagaimana BUMDes dikelola. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan PADes, yang berarti proses pembangunan dan kesejahteraan. Namun, berbagai kendala sering kali menghambat pelaksanaan BUMDes. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rindi (2017), salah satu kendala utama dalam operasional BUMDes adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Banyak masyarakat yang belum aktif berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes, sebagian besar karena masih mengandalkan sistem gotong royong tanpa imbalan yang memadai. Selain itu, dana desa yang tersedia untuk pengelolaan BUMDes sering kali sangat terbatas, sehingga rencana-

⁸ Ratnia Solihah, Mustabsyrotul Ummah Mustofa, dan Siti Witianti, 'PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DI DESA KUTAMANDIRI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG.', *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 11.3 (2022).

⁹ Septyansyah Perdana, 'Pengelolaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat', *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10.4 (2024), 2582–88.

¹⁰ Bambang Haryadi, 'Pelatihan Dan Pendampingan Manajemen Keuangan Dan Laporan Keuangan Bumdes Sempurna Bangkalan: Bumdes Sempurna Bangkalan', *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 4.1 (2023), 1–15.

rencana pengelolaan BUMDes sering kali tidak dapat direalisasikan dengan baik masyarakat akan mengalami peningkatan.¹¹ Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perhatian khusus terhadap manajemen BUMDes, termasuk pengelolaan SDM yang baik. Keterlibatan masyarakat desa dari berbagai lapisan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sangat penting dalam menentukan keberhasilan BUMDes. Masyarakat yang terlibat aktif akan lebih memahami kebutuhan dan potensi desa, sehingga BUMDes dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien.¹²

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian desa dan memberdayakan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengganggu efektivitas dan keberlanjutannya.¹³ Salah satu masalah utama adalah tingginya tingkat intervensi pemerintah, yang kadang-kadang dapat mengurangi otonomi desa dalam pengelolaan usahanya. Sebagai contoh, data yang dirilis oleh Kompas pada tahun 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 2.188 BUMDes tidak beroperasi, dan 1.670 BUMDes yang beroperasi belum dapat memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian desa.¹⁴

¹¹ Renya Rosari, 'Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES Di Era Digitalisasi', *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6.3 (2022), 3040–49.

¹² Ristiana Suwito dan Amin Yusuf, 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Desa Wisata Lerep', *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2020, 88–101.

¹³ Moch Rifqi Tamaputra dan Rifqi Ridlo Phahlevy, 'Optimizing Village Wealth Through the Transition to BUMDes in Indonesia', *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15.2 (2024), 10–21070.

¹⁴ Wahyuni, Wirawan Suhaedi, dan Isnawati, 'Analisis Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima', *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2.4 (2022), 698–705.

Situasi ini mengindikasikan perlunya melakukan evaluasi mendalam terhadap strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan BUMDes agar bisa lebih efektif. Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya bagi BUMDes untuk membangun kemitraan yang kuat dengan sektor-sektor produktif, seperti sektor bisnis pasca-panen dan pariwisata. Kemitraan strategis ini berpotensi untuk memperkuat daya saing BUMDes serta menjamin keberlanjutan usahanya, sehingga dapat menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat desa. Dengan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, BUMDes diharapkan mampu berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan dan lebih mandiri.¹⁵ Oleh karena itu, pendirian BUMDes di Desa Maja juga bertujuan untuk menciptakan peluang kerjasama dan kolaborasi dengan sektor-sektor tersebut, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada.

Desa Maja, yang terletak di Kabupaten Lebak, memiliki potensi besar untuk mengembangkan BUMDes yang produktif dan berkelanjutan. Dalam pengembangan BUMDes di Desa Maja, penting untuk mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap sumber daya yang ada, BUMDes dapat mengidentifikasi peluang usaha yang sesuai dan relevan. Beberapa jenis usaha yang dapat dikembangkan antara lain usaha pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan, dan layanan publik yang dapat mendatangkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Usaha-usaha ini

¹⁵ Ike Wanusmawatie dan Mochamad Chazienul Ulum, *Dinamika Per (Desa) an: Isu Strategis Dan Rekomendasi Kebijakan* (Universitas Brawijaya Press, 2021).

tidak hanya akan memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga dapat memperkuat identitas dan budaya lokal.¹⁶

Peran pemerintah desa sangat diperlukan dalam memfasilitasi dan mendukung pengembangan BUMDes. Dukungan ini dapat berupa penyediaan pelatihan, akses modal, dan promosi usaha. Pemerintah desa perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan BUMDes.¹⁷ Selain itu, pemerintah desa juga harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pengelolaan BUMDes. Kesadaran masyarakat akan potensi BUMDes dan peran mereka dalam pengembangannya akan meningkatkan partisipasi dan dukungan terhadap program-program yang dijalankan.

Pelatihan dan pendidikan bagi pengelola BUMDes dan masyarakat adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan adanya pelatihan yang tepat, pengelola BUMDes dapat memahami manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan. Masyarakat yang terlatih akan mampu mengelola usaha dengan baik, mengidentifikasi peluang pasar, dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan kewirausahaan yang dapat memberdayakan masyarakat

¹⁶ Amalia Mustika, *Pengembangan Desa Sungsang Menjadi Desa Wisata Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan* (Jakarta: CV Widina Media Utama, 2022).

¹⁷ Wildan Syafitri, 'Peningkatan Potensi Ekonomi Di Desa Bagelenan, Kabupaten Blitar Melalui Inisiatif Masyarakat (Community-Based Initiatives)', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4.5 (2023), 162–69.

desa. Proses ini dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, kreatif, dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada.¹⁸

Dalam pelaksanaan program BUMDes Kalimaya di Desa Maja, tercipta kolaborasi yang erat antara pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Sinergi ini dibangun melalui pengelolaan yang terstruktur dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, sehingga dapat menciptakan kerjasama yang solid dalam mencapai visi pembangunan desa. Dengan dukungan penuh dari masyarakat serta keterlibatan mereka dalam berbagai program, BUMDes memiliki potensi untuk beroperasi secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian desa. Hal ini juga berdampak positif dalam upaya mengentaskan kemiskinan di tingkat desa. Ke depannya, BUMDes diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan, memainkan peran strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁹

Implementasi program BUMDes yang inklusif dan partisipatif di Desa Maja juga dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam pengelolaan BUMDes. Dengan pendekatan ini, setiap desa dapat menyesuaikan program BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal masing-masing. Pembelajaran dari pengalaman Desa Maja dapat

¹⁸ I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi dan Mangku Suryana I Nyoman, 'KOLABORASI TRIPLE HELIX DALAM PROGRAM INOVASI DESA (Studi Kasus: Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar)', *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15.02 (2024), 253–62.

¹⁹ Achmad Zahrudin, 'Pemberdayaan Program Pelatihan Bumdes Dalam Mengembangkan Perekonomian Desa', *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.4 (2023), 7771–78.

memberikan wawasan bagi desa-desa lain tentang bagaimana mengelola BUMDes secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, BUMDes memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi seluruh warga desa. Dalam mewujudkan hal ini, perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian terhadap sistem pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi serta kebutuhan masyarakat setempat. Langkah-langkah perbaikan yang terus-menerus ini akan memastikan bahwa BUMDes tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan begitu, BUMDes dapat terus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa dan menjadi instrumen penting dalam pembangunan desa yang berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pentingnya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai solusi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa menjadi sangat relevan. Desa Maja, dengan potensi sumber daya yang dimiliki, memiliki peluang besar untuk mengimplementasikan program BUMDes Kalimaya secara efektif. Program ini tidak hanya dapat menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, BUMDes Kalimaya berpotensi menjadi motor penggerak dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **"Pelaksanaan Program Usaha Milik Desa**

(BUMDes) Kalimaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa masalah yang perlu dirumuskan untuk dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalimaya di Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak?
- 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program BUMDes Kalimaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Maja?
- 3) Bagaimana Kontribusi BUMDes Kalimaya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan program BUMDes Kalimaya di Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program BUMDes Kalimaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Untuk menjelaskan kontribusi program BUMDes Kalimaya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian ini meliputi:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori terkait pengelolaan BUMDes dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Hasil penelitian ini juga dapat menambah referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pelaksanaan program BUMDes agar dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bagi Pengelola BUMDes: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis mengenai strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan BUMDes Kalimaya agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang ada di Desa Maja.
- c. Bagi Masyarakat Desa: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai manfaat BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program yang dijalankan oleh BUMDes.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalimaya di Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, sangat perlu perbandingan dalam karya ilmiah berupa skripsi dari beberapa sumber seperti skripsi, tesis, jurnal, antara lain:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Amira Azari Pratiwi yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis”. Pada Tahun 2022. Adapun hasil dari penelitian skripsi tersebut adalah bagaimana pengelolaan BUMDes berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat dengan mengevaluasi efektivitas program-program yang dijalankan. Fokus utamanya adalah pada bagaimana implementasi BUMDes dapat berkelanjutan dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.²⁰

Perbandingan pada skripsi yang telah diteliti oleh Amira Azari Pratiwi dengan penelitian yang penulis lakukan cukup berbeda, perbedaannya adalah terletak pada konteks geografis dan spesifik dari program BUMDes Kalimaya. Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada implementasi program BUMDes Kalimaya yang bersifat untuk di Desa Maja, dengan fokus pada faktor-faktor lokal seperti potensi sumber daya alam yang spesifik di wilayah tersebut dan bagaimana program-program ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga akan

²⁰ Amira Azari Pratiwi, ‘Evaluasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis’, 2022.

menganalisis tantangan yang dihadapi oleh BUMDes Kalimaya dalam menjalankan program-programnya, yang memiliki perbedaan dari daerah penelitian sebelumnya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nia Febriani dengan judul “Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya”. Pada tahun 2022. Adapun hasil dari penelitian skripsi tersebut adalah mengkaji optimalisasi fungsi BUMDes di Desa Kubang Jaya, Riau, dengan pendekatan yang lebih teknis. Penelitian ini berfokus pada bagaimana BUMDes bisa lebih optimal dalam menjalankan fungsinya, serta strategi-strategi yang diterapkan untuk memaksimalkan potensi ekonomi desa. Salah satu aspek penting yang dibahas adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dan dampaknya terhadap kesejahteraan.²¹

Perbandingan pada skripsi yang telah diteliti oleh Nia Febriani dengan penelitian yang penulis lakukan cukup berbeda, perbedaannya adalah terletak pada konteks geografis dan spesifik dari program BUMDes Kalimaya. Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada implementasi program BUMDes Kalimaya yang bersifat untuk di Desa Maja, dengan fokus pada faktor-faktor lokal seperti potensi sumber daya alam yang spesifik di wilayah tersebut dan bagaimana program-program ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh BUMDes Kalimaya dalam menjalankan program-programnya, yang memiliki perbedaan dari daerah penelitian sebelumnya.

²¹ Nia Febriani, ‘Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya’ (UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022).

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Septiani Novi, dengan judul “Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gunung Rajak”. Pada tahun 2023. Adapun hasil penelitian yang dihasilkan adalah melakukan penelitian terkait implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gunung Raja. Studi ini memberikan perhatian khusus pada aspek pemberdayaan masyarakat, terutama dalam melihat bagaimana BUMDes dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kemandirian ekonomi warga setempat. Fokus penelitian ini mencakup sinergi antara program-program BUMDes dengan potensi ekonomi dan sumber daya lokal yang ada di desa. Selain itu, penelitian juga menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahap pengembangan usaha BUMDes, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi desa.²²

Perbandingan pada skripsi ketiga yang telah diteliti oleh Septiani Novi dengan penelitian yang penulis lakukan cukup berbeda, perbedaannya adalah terletak pada konteks geografis dan spesifik dari program BUMDes Kalimaya. Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada implementasi program BUMDes Kalimaya yang bersifat untuk di Desa Maja, dengan fokus pada faktor-faktor lokal seperti potensi sumber daya alam yang spesifik di wilayah tersebut dan bagaimana program-program ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga akan

²² SEPTIANI NOVI, ‘PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA GUNUNG RAJAK’ (Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2023).

menganalisis tantangan yang dihadapi oleh BUMDes Kalimaya dalam menjalankan program- programnya, yang memiliki perbedaan dari daerah penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Pemikiran

1) BUMDes

Secara kelembagaan, pemerintah desa dan masyarakat desa mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan badan usaha komersial. Alasan utama dibentuknya badan usaha ini adalah untuk mengelola potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa. Berbeda dengan badan usaha ekonomi lainnya, BUMDes dimaksudkan agar bersifat fleksibel, yaitu dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik desa yang unik serta memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan warganya. BUMDes diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara umum melalui kegiatan ekonomi di tingkat desa.²³

Sebagaimana yang tertuang dalam Permendesa PDTT No. 5 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan, Tata Usaha, dan Pembubaran BUMDes, pendirian BUMDes bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, menambah sumber pendapatan asli desa, memberikan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat desa, dan menjadi ujung tombak kegiatan usaha di desa. Beberapa konsep, antara lain akuntabilitas dan

²³ Hailudin, 'Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur', *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.1 (2021), 1–9.

keterbukaan, harus diterapkan agar pengelolaan BUMDes dapat mencapai tujuan secara optimal sesuai dengan ketentuan tersebut. Keterlibatan pemerintah desa dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan menjaga agar tidak terjadi campur tangan pihak lain yang dapat merugikan, karena BUMDes merupakan penyedia modal utama atau co-founder bagi masyarakat.²⁴

Untuk mengelola perusahaan, memanfaatkan aset secara optimal, mendorong investasi dan produktivitas, serta memberikan berbagai layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa sendiri atau bekerja sama dengan desa lain. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menunjukkan tanggung jawab organisasi yang melaporkan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dan memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Salah satu impian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan adalah BUMDes. Kehadiran BUMDes dapat menggugah seluruh warga desa untuk menggali potensi yang ada di lingkungannya.²⁵

BUMDes dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk memanfaatkan daya cipta dan kreativitas desa guna mendukung terciptanya lapangan kerja baru dan penyediaan tenaga kerja bagi daerah pedesaan. BUMDes berperan sebagai lembaga sosial yang sangat penting dalam memberikan pelayanan yang menjunjung tinggi kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang dikelola

²⁴ Angelina Trimurti Rambu Ana dan Linda Lomi Ga, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes INA HUK)', *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9.1 (2021), 62–72.

²⁵ Anita Firnanda, 'Literature Review: Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1.5 (2023), 198–205.

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, BUMDes selain meningkatkan kesejahteraan sosial, juga meningkatkan perekonomian. Secara khusus, pembangunan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan telah diuntungkan oleh kedudukan ganda BUMDes sebagai badan ekonomi dan sosial, yang telah memperkuat perekonomian desa. Dengan digerakkan oleh BUMDes yang memanfaatkan sumber daya desa yang melimpah untuk kepentingan bersama, perekonomian daerah pun ikut terdorong.²⁶

Sejak beroperasi sekitar lima tahun lalu, BUMDes di Indonesia belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan unit usaha. Hasil yang diperoleh belum ideal, meskipun BUMDes telah terbentuk dalam jumlah besar sejak disahkannya Undang-Undang Desa. Berdasarkan data statistik, pada Desember 2019 tercatat sebanyak 45.549 BUMDes tersebar di 74.954 desa di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, 60,76% desa di Indonesia telah membentuk BUMDes, sedangkan 39,24% desa lainnya belum membentuk BUMDes. Banyak desa yang belum memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan perekonomian daerahnya, meskipun jumlah BUMDes telah melampaui separuh jumlah seluruh masyarakat. Untuk memaksimalkan kemampuan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka yang perlu dilakukan adalah mempercepat pembentukan dan pengelolaan BUMDes.²⁷

Karena kurangnya keterlibatan dalam mencapai tujuan pendiriannya, pendirian BUMDes di berbagai komunitas terkadang dianggap hanya formalitas belaka. Kendala dari BUMDes yaitu :

²⁶ Ibid.

²⁷ Baretha M Titioka and others, 'Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kabupaten Kepulauan Aru', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 3.1 (2020), 197–216.

- a) Ketidakmampuan menghimpun dana dalam jumlah besar.
- b) Sulit melakukan diversifikasi usaha.
- c) Kinerja kelembagaan kurang optimal.
- d) Kurangnya sumber daya untuk mengelola BUMDes.
- e) Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang BUMDes.
- f) Minimnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan BUMDes.²⁸

BUMDes memegang peranan yang sangat penting dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Sebagai elemen kunci, BUMDes diharapkan mampu berfungsi sebagai pusat ekonomi yang tidak hanya mendukung ekonomi desa secara keseluruhan tetapi juga memperkuat ekonomi setiap keluarga. Untuk mencapai peran ini, BUMDes perlu dirancang dan dijalankan dengan strategi yang matang dan berkelanjutan. Tujuan utama keberadaan BUMDes adalah untuk membangun dan memajukan perekonomian masyarakat desa. Selain berfokus pada pencapaian hasil finansial, BUMDes juga dituntut untuk turut andil dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia desa, sehingga keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam berwirausaha dan mengelola usaha dapat terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi, menurut Olanrewaju, bergantung pada :

- a) Pengembangan masyarakat
- b) Pengembangan sumber daya manusia
- c) Pengembangan teknologi
- d) Kemandirian, dan
- e) Perubahan perilaku.

²⁸ Ibid

Dengan demikian, optimalisasi BUMDes akan membuat masyarakat desa lebih kompetitif dan mampu menyejahterakan diri sendiri.²⁹

Dengan memberdayakan masyarakat desa untuk memperoleh keuntungan ekonomi, BUMDes berharap dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian mereka. Selain mendukung Pemerintah Desa, BUMDes juga bertujuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah federal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan terhadap kegiatan desa. Menyelidiki berbagai kemungkinan di daerah tersebut merupakan cara BUMDes didirikan dan dirintis. Untuk mengelola potensi sebaik mungkin, kota harus menilai dan memetakannya, memahami manfaat dan kekurangannya, serta mendorong inovasi dan kreativitas.³⁰

BUMDes tidak hanya harus didirikan seperti desa-desa lainnya, tetapi juga harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki desa dan potensi masyarakat di sekitarnya. Keberhasilan BUMDes ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya terhadap kesejahteraan dan kemajuan ekonomi masyarakat desa, bukan oleh berapa lama organisasi tersebut beroperasi. Pendapatan Asli Desa (PAD) meningkat dan interaksi warga berubah sebagai akibat dari BUMDes, yang berdampak signifikan pada ekonomi dan masyarakat. Informasi manajemen yang dapat diakses harus diberikan kepada pihak-pihak terkait untuk menunjukkan kontribusi nyata

²⁹ Rizki Febri Eka Pradani, 'Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa', *Juornal of Economics and Policy Studies*, 1.1 (2020), 23–33.

³⁰ Karlina Ghazalah Rahman dan Ali Murdhani Ngandoh, 'Pengembangan Aplikasi Pencatatan Keuangan BUMDes Pada BUMDes Semarak Bantaeng Di Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Makassar, Sulawesi Selatan', *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6.3 (2022), 531–38.

BUMDes terhadap pertumbuhan pendapatan desa. Meskipun BUMDes telah menyebabkan peningkatan PAD, kurangnya komunikasi dan sosialisasi sering kali mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan BUMDes, yang membutuhkan akuntabilitas dan transparansi.³¹

Tujuan utama dari BUMDes yaitu untuk mengawasi dan mengembangkan potensi daerah di bidang :

- a) Usaha kecil
- b) Pariwisata
- c) Pertanian
- d) Peternakan, dan
- e) Usaha ekonomi lainnya

Meskipun potensinya besar, pembangunan ekonomi desa terhambat oleh sejumlah masalah yang kerap dihadapi BUMDes. Seiring dengan berkembangnya ekonomi desa, BUMDes menghadapi sejumlah masalah mendasar. Pertama, anggota BUMDes kurang memahami manajemen, pemasaran, dan pengelolaan keuangan karena pengetahuan dan kemampuan mereka yang rendah. Kedua, ketidakmampuan mereka mengembangkan perusahaan karena kurangnya akses pembiayaan menghambat kemajuan ekonomi kota. Ketiga, tantangan dalam menangani izin perusahaan dan pajak berasal dari prosedur administratif dan peraturan yang berbelit-belit. Lebih jauh, ketergantungan yang besar pada bantuan publik menurunkan insentif untuk mencari jawaban sendiri. BUMDes kurang kompetitif karena kurangnya inovasi dalam penawaran

³¹ Aulia Tafhana Arindhawati dan Evy Rahman Utami, 'Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pongkok, Tlogo, Ceper Dan Manjungan Kabupaten Klaten)', *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4.1 (2020), 43–55.

barang dan jasa, dan ekspansi serta kolaborasi terhambat oleh jaringan bisnis kecil.³²

Secara teori, faktor-faktor berikut dapat membantu kota untuk mendirikan BUMDes:

- a) Inisiatif dari masyarakat atau pemerintah desa.
- b) Kemungkinan usaha bisnis di masyarakat.
- c) Sumber daya alam desa.
- d) Sumber daya manusia yang mampu mengawasi BUMDes tersedia.
- e) Pemerintah desa dapat menyediakan dana atau mengelola aset desa atas nama BUMDes sebagai sarana penyertaan modal.³³

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang dikelola secara profesional dan menghimpun kegiatan ekonomi dari masyarakat. Dana desa dapat dimanfaatkan oleh desa untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pembangunan ekonomi, sehingga BUMDes menjadi alat vital bagi masyarakat dalam mewujudkan potensinya sebagai suatu perekonomian. Meskipun demikian, janji awal desa harus tetap menjadi fokus utama dalam pertumbuhannya. Kemampuan BUMDes untuk berfungsi secara efektif sangat bergantung pada struktur organisasinya yang jelas, di mana tanggung jawab dan wewenang masing-masing anggota sangat penting bagi prosedur operasional lembaga tersebut. Struktur BUMDes yaitu :

- a) Ketua/Direktur
- b) Sekretaris
- c) Bendahara
- d) Pengawas

³² Ibid

³³ Asep Suryadi, 'Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung', 2021.

Kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dan positif dengan masyarakat serta memiliki visi yang jelas sangat krusial bagi ketua atau direktur. Peran mereka dalam mengarahkan dan memimpin organisasi tidak dapat dianggap remeh, karena kepemimpinan yang efektif dapat memengaruhi semua aspek operasional BUMDes. Selain itu, sekretaris tidak hanya bertugas mencatat hasil rapat, tetapi juga bertanggung jawab untuk merancang strategi yang jelas guna melaksanakan hasil rapat tersebut. Mereka perlu memastikan bahwa setiap rencana yang dihasilkan akan diterapkan di bagian-bagian yang tepat, sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan, bendahara memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam mengendalikan aliran pendapatan yang berasal dari berbagai unit usaha. Mereka harus mampu melakukan perkiraan yang akurat tentang modal kerja yang diperlukan untuk menjaga kelancaran operasional, serta memastikan bahwa semua keuangan dikelola secara efisien dan transparan. Sementara itu, pengawas memiliki tanggung jawab untuk memantau semua kegiatan bisnis BUMDes, memastikan bahwa semua operasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.³⁴

Dalam konteks pengembangan usaha, BUMDes memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan masyarakat. Dengan mendirikan berbagai unit usaha, BUMDes tidak hanya membantu individu menyadari dan mengembangkan potensi yang mereka miliki, tetapi juga menyediakan berbagai peluang kerja bagi masyarakat setempat. Keberadaan BUMDes menjadi sumber inspirasi dan dorongan

³⁴ Swastiani Dunggio, 'Pengaruh Kemampuan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)', *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 3.1 (2020), 15–24.

bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengembangkan usaha mereka sendiri, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga. Partisipasi masyarakat dalam program-program yang diselenggarakan oleh BUMDes sangatlah penting. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan tersebut. Dengan berpartisipasi, masyarakat dapat menyesuaikan program-program yang ada dengan kebutuhan dan keadaan aktual mereka, sehingga hasil yang dicapai akan lebih relevan dan berdampak positif. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat krusial untuk keberhasilan pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes, serta untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.³⁵

2) Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah kondisi aman, tenteram, dan makmur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berbeda dengan kehidupan yang aman, yang berarti terbebas dari tantangan dan kemalangan, keamanan adalah tidak adanya risiko atau gangguan. Kehidupan yang tenang adalah cerminan dari lingkungan yang aman, tenteram, dan bebas dari kekacauan. Secara lebih luas, kesejahteraan mengacu pada kondisi di mana seseorang terbebas dari kebodohan, kemiskinan, dan ketakutan sehingga memiliki kehidupan yang aman dan tenteram secara fisik dan psikologis. Definisi masyarakat yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekumpulan individu yang dipersatukan oleh norma budaya bersama. Rumah yang baik, sandang dan pangan yang cukup, serta akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan

³⁵ Jajang Abdul Nurhasan dan Asep Hamdan Munawar, 'Efektivitas Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Panjalu', *ANTARADHIN: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 1.2 (2020), 89–99.

terjangkau merupakan contoh kebutuhan mendasar yang terpenuhi dalam hal kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, setiap orang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya sekaligus memaksimalkan utilitasnya dalam kerangka keuangan tertentu.³⁶

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua istilah: "kesejahteraan" dan "masyarakat." "Sejahtera," yang berarti aman, damai, sejahtera, dan terlindungi, atau bebas dari berbagai gangguan dan masalah, merupakan akar kata dari kata kesejahteraan. Kondisi aman, tenteram, tenang, dan sejahtera termasuk dalam pengertian kesejahteraan. Di sisi lain, dalam konteks Indonesia, masyarakat mengacu pada sekumpulan orang yang hidup berdampingan, berkomunikasi, dan saling memengaruhi, sehingga membentuk suatu komunitas. Kesejahteraan dicirikan sebagai tatanan sosial dengan komponen material dan spiritual, serta rasa moralitas, keamanan, dan ketenangan pikiran. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia dan kewajiban sesuai dengan Pancasila dan secara ideal memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial mereka untuk diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat.³⁷

Kesejahteraan masyarakat tidak terlalu dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki pekerjaan produktif, sedangkan sebagian besar tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan yang tidak memuaskan, yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas masyarakat atau tingginya angka pengangguran. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah PDRB. Oleh

³⁶ Dahliana Sukmasari, 'Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an', *At-Tibyan*, 3.1 (2020), 1–16.

³⁷ Jusman Iskandar and others, 'Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa', *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19.2 (2021), 1–11.

karena itu, tuntutan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah harus menentukan cara terbaik untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan alam. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera, pemerintah diharapkan untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁸

Suatu masyarakat dapat menunjukkan bahwa mereka telah mencapai kemakmuran dengan melihat tingkat kesejahteraan mereka. Banyak faktor yang mempengaruhi kesejahteraan, termasuk :

- a) Kesehatan
- b) Status keuangan
- c) Kepuasan
- d) Kualitas hidup bersama

Keluarga yang sejahtera umumnya memiliki kemampuan finansial untuk mendukung anggotanya dalam melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi atau mengejar gelar yang lebih tinggi. Peningkatan kesejahteraan keluarga sering kali berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, karena pendidikan membuka peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan tetap dan penghasilan yang layak. Kesejahteraan di sini merujuk pada kemampuan keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup yang layak, sehat, dan produktif, sehingga dianggap sebagai tujuan utama setiap keluarga. Namun, berdasarkan data BPS, sebanyak 28 juta orang atau sekitar 10,8% dari total penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang artinya mereka masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan paling dasar.³⁹

³⁸ Nawarti Bustamam, Shinta Yulyanti, dan Kantthi Septiana Dewi, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru', *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32.1 (2021).

³⁹ Rizki Afri Mulia dan Nika Saputra, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang', *Jurnal El-Riyasah*, 11.1 (2020), 67–83.

Ketika regulasi ekonomi diterapkan untuk mengatur tindakan berbagai pihak dan mengelola distribusi kekayaan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi, maka kondisi kesejahteraan sosial yang menguntungkan dapat terwujud. Kesejahteraan akan tercapai ketika perilaku atau tindakan tertentu dapat menciptakan kepuasan yang sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Dalam konteks ini, kesejahteraan tidak hanya terbatas pada satu dimensi, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan. Selain faktor ekonomi yang menjadi elemen utama dalam kesejahteraan, terdapat pula elemen non-ekonomi yang turut mempengaruhi, seperti aspek politik, sosial, dan budaya. Semua faktor ini saling terkait dan berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh bagi masyarakat.⁴⁰

Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan mengurangi kemiskinan, BUMDes dijalankan secara langsung dengan melibatkan masyarakat. BUMDes memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian masyarakat desa sebagai perkumpulan ekonomi rakyat. Mengoptimalkan kekayaan desa, memajukan usaha, memperluas lapangan pekerjaan, membina kekeluargaan, mengembangkan perekonomian, dan meningkatkan pendapatan desa merupakan tujuan BUMDes. Kemajuan desa akan terwujud melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan saling bergotong royong, BUMDes menjadi salah satu cara mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang mandiri. Karena

⁴⁰ Novita Riyanti, 'Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul)', *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2021), 80–93.

mengutamakan kepentingan masyarakat, BUMDes masuk dalam naungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengelolaan keuangan yang baik pada BUMDes sangat penting dalam setiap kegiatan dan memberikan hasil yang maksimal karena dapat memaksimalkan program dan memperlancar operasional BUMDes.⁴¹

Penyediaan berbagai kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, akses yang memadai terhadap makanan dan pakaian, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, merupakan aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Semua elemen ini dianggap sebagai bagian integral dari kesejahteraan yang mencakup kualitas hidup secara menyeluruh. Selain itu, kesejahteraan juga mencakup situasi di mana individu atau kelompok, baik secara pribadi maupun organisasi, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis mereka dengan cara yang berkelanjutan. Mereka dapat mengoptimalkan potensi penuh mereka tanpa melebihi batasan sumber daya finansial yang dimiliki. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dasar dan pengelolaan keuangan yang bijaksana, agar masyarakat dapat hidup dengan lebih sejahtera dan berkembang secara maksimal dalam konteks ekonomi yang ada.⁴²

⁴¹ Nur Ida Iriani, Anung Prasetyo Nugroho, dan Maria Yosifa Tia, 'PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT', *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 10.1 (2022), 27–34.

⁴² Alfian Eikman and Mala Vinuzia, 'Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di DesaTua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4.3 (2020).

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali dan menjelaskan pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalimaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan multidimensional. Peneliti dapat melakukan observasi langsung serta berinteraksi dengan berbagai pihak yang terlibat, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada mendeskripsikan realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat desa, dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana program BUMDes Kalimaya berperan dalam memengaruhi kondisi kesejahteraan mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci dampak nyata yang ditimbulkan oleh program tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, serta bagaimana pengelolaan BUMDes mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup mereka.

Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman dan perspektif dari individu maupun kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan program BUMDes, seperti pengurus BUMDes, aparat desa, dan masyarakat yang terlibat dalam atau memanfaatkan program tersebut. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana program BUMDes Kalimaya diimplementasikan, tantangan yang

dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat, serta dampak konkret yang ditimbulkan terhadap perekonomian masyarakat desa. Penelitian ini fokus pada proses yang berlangsung di lapangan serta hasil-hasil yang dapat diamati secara langsung. Tidak hanya menggambarkan fenomena secara rinci, namun juga mengungkap persepsi, pandangan, dan pengalaman para pelaku program BUMDes, baik mereka yang mengelola maupun mereka yang menerima manfaatnya. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika pelaksanaan BUMDes dan bagaimana program tersebut berinteraksi dengan konteks sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat desa. Hal ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam implementasi program serta untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan pengembangan di masa depan.

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini juga mendukung eksplorasi tema-tema yang muncul secara alami selama pengumpulan data.⁴³ Hal ini sangat dibutuhkan karena program BUMDes Kalimaya beroperasi dalam konteks sosial dan budaya yang unik di Desa Maja, sehingga penting bagi peneliti untuk memahami dinamika lokal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan deskripsi yang kaya dan mendalam mengenai pelaksanaan program BUMDes, memberikan wawasan baru yang dapat digunakan oleh pihak terkait untuk mengoptimalkan program ini di masa depan.⁴⁴

⁴³ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

⁴⁴ Muhammad Fatihuddin Isa, M Husni Tamrin, dan Imanudin Kudus, 'Transformasi BUMDes Melalui Community Based Tourism Dalam Pengembangan

Penelitian kualitatif deskriptif memberikan fleksibilitas yang signifikan bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan penelitian seiring dengan berjalannya proses pengumpulan data, berdasarkan temuan awal yang ditemukan di lapangan. Misalnya, jika dalam tahap observasi awal peneliti menemukan adanya masalah dalam pengelolaan sumber daya atau kurangnya partisipasi masyarakat, maka peneliti dapat dengan mudah merumuskan pertanyaan baru atau memperdalam topik tertentu melalui wawancara lanjutan atau observasi lebih mendalam. Fleksibilitas ini sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi masalah yang mungkin sebelumnya tidak terdeteksi atau kurang terfokus. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggali aspek-aspek signifikan dari pelaksanaan program BUMDes Kalimaya secara lebih komprehensif dan tepat sasaran, serta memastikan bahwa seluruh dinamika yang mempengaruhi program tersebut dapat teridentifikasi dan dianalisis dengan lebih akurat. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pendekatan penelitian sesuai dengan realitas yang ditemukan di lapangan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan mengenai berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Maja.⁴⁵

2) Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2024 di Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Desa

Pariwisata: Studi Pada Desa Sekapuk, Kabupaten Gresik', *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 1.1 (2024), 1–12.

⁴⁵ Melyana R Pugu, Sugeng Riyanto, and Rofiq Noorman Haryadi, *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, Dan Aplikasi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

ini dipilih karena memiliki program BUMDes Kalimaya yang aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai usaha, seperti simpan pinjam dan perdagangan hasil pertanian. Waktu penelitian disesuaikan dengan aktivitas BUMDes, terutama di bulan Juni sampai dengan bulan Oktober ketika kegiatan ekonomi desa biasanya berjalan optimal. Lokasi ini relevan karena Desa Maja memiliki potensi lokal yang menjadi fondasi pelaksanaan program BUMDes, dan waktu penelitian memungkinkan peneliti untuk mengamati aktivitas masyarakat serta kontribusi BUMDes dalam konteks sosial-ekonomi desa.

3) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah modus utama pengumpulan data dalam penyelidikan ini. Akar kata observasi dalam bahasa Latin adalah *obviare*, yang berarti mengikuti dari dekat. Ini memerlukan analisis metodis dan mendalam tentang tindakan audiens target. Ketika Anda melihat sesuatu, Anda melihatnya dari dekat, apakah itu gejala atau barang yang sebenarnya. Ketika menggunakan metodologi penelitian observasional atau lapangan, peneliti harus pergi ke lapangan untuk mengumpulkan data tentang konteks topik, lingkungan, aktor, aktivitas, objek, peristiwa, tujuan, dan emosi. Peneliti dalam penelitian ini bertugas untuk mengamati lokasi penelitian yaitu Desa Kalimya ditinjau dari letak dan kondisi masyarakat disana, serta hasil pembangunan, hasil pembangunan, lokasi, dan pengelolaannya.⁴⁶

⁴⁶ Emzir M, Metodologi penelitian kualitatif “Analisis Data” (Jakarta: Rajawali pers, 2012)

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang mungkin memiliki jawaban yang Anda butuhkan. “Salah satu cara pengumpulan informasi adalah melalui wawancara,” yakni memperoleh data dengan cara menanyakan kepada responden. Di Indonesia, teknik ini banyak digunakan saat ini. Penulis penelitian ini menggunakan panduan berupa pertanyaan yang diajukan kepada informan 5 orang guna melakukan wawancara yang terorganisir untuk penelitian ini. Ponsel, buku, dan pensil semuanya digunakan dalam proses investigasi. Oleh karena itu yang menjadi informan saat wawancara yaitu: Bapa asep salah satu salar pasar, bapak Solah sekretaris BUMDES, bapak Budi Hermansyah ketua BUMDES kalimaya, ibu Sri Hartini sebagai ketua penyewa gedung serba guna, dan bapak yanto selaku tokoh masyarakat.⁴⁷

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang ketiga ini ialah Teknik dokumentasi. Yang di mana dokumentasi ini merupakan catatan untuk peristiwa yang sudah berlalu. Catatan mungkin juga dalam bentuk buku, lukisan, atau bahkan struktur fisik. Catatan tertulis, seperti jurnal, memoar, biografi, ketetapan, dan kebijakan. Foto, rekaman video, gambar, dan dokumentasi visual lainnya. Karya seni dan karya kreatif lainnya dalam semua inkarnasinya (foto, patung, video, dll.) Yang berfungsi sebagai

⁴⁷ Muhammad Musa dan Titi Nutfitri, *Metodologi Penelitian*, (Fajar Agung: Jakarta, 1998) h.49

bukti dokumenter. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen melengkapi pendekatan tradisional seperti wawancara dan observasi partisipan. Penelitian ini mengandalkan catatan dari Kantor Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dan juga mewawancarai masyarakat setempat.⁴⁸

4) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi utama yang berasal dari sumber yang dapat diandalkan. Data primer sendiri merupakan informasi yang unik dan dikumpulkan oleh ilmuwan yang sebenarnya untuk menjawab masalah pemeriksaan eksplisit. Informasi ini tidak dapat diakses dan para ilmuwan perlu mengumpulkan atau mendapatkan informasi itu sendiri.⁴⁸ Penelitian ini memperoleh informasi melalui beberapa pihak terkait melalui berbagai sumber seperti persepsi langsung, wawancara atau lainnya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sebuah informasi yang tidak didapat langsung dari sumbernya.⁴⁹ Informasi yang dieksplor tersebut melalui laporan- laporan yang ada terkait dengan kondisi dan wilayah geologi dari tempat- tempat yang diteliti, buku-buku, web, dan berbagai sumber.

⁴⁸ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), cetakan kedua, h. 38.

⁴⁹ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), cetakan kedua, h. 33.

5) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara efisien yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan berbagai bahan, dengan tujuan agar informasi tersebut dapat diperoleh dengan mudah, dan penemuan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis Miles dan Huberman. Berikut adalah langkah analisis data Miles dan Huberman:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan interaksi penalaran yang sensitif yang membutuhkan pengetahuan dan keluasan serta kedalaman pemahaman yang tinggi.⁵¹ Reduksi data mengacu pada cara yang paling umum untuk memilih, memusatkan, menyederhanakan, mengisolasi, dan mengubah informasi "kasar" seperti yang terlihat dalam catatan lapangan yang disusun.⁵²

Dalam penelitian ini, saya mereduksi data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian yaitu Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa Kalimaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* , h. 332.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* , h. 337.

⁵² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), cetakan keempat, h.407-408.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan informasi berupa gambaran singkat, tabel, bagan, pie chart, pictogram, dan sebagainya.⁵³ Dalam penyajian data, penulis menyajikan dalam bentuk uraian-uraian. Penggambaran informasi tersebut sebagai klarifikasi tugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Program Bumdes Kalimaya, dan mengawasi, seperti halnya pencapaian administrasi sosial tersebut.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang ditetapkan masih bersifat sementara, dan akan berubah dengan asumsi tidak ada bukti kuat yang ditemukan untuk membantu fase pengumpulan informasi berikutnya.⁵⁵ Saya memberikan akhir pada informasi yang ada dan informasi yang didapat dari lapangan. Informasi yang saya peroleh berasal dari upaya pembangunan batas wilayah setempat, dengan menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati selama latihan ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memperkenalkan topik penelitian tentang pelaksanaan program BUMDes Kalimaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Maja, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Diuraikan juga tinjauan pustaka terkait BUMDes

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, h.339.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, h.343.

dan kesejahteraan masyarakat, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan BUMDes Kalimaya

Bab ini menggambarkan Desa Maja dan BUMDes Kalimaya, termasuk profil desa, sejarah, visi, misi, dan tujuan BUMDes. Struktur kepengurusan dan program-program BUMDes, seperti usaha simpan pinjam dan perdagangan hasil pertanian, juga dijelaskan.

BAB III: Kondisi Umum Program BUMDes Kalimaya

Bab ini membahas kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Desa Maja, partisipasi dalam program BUMDes, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, sebagai konteks operasional BUMDes Kalimaya.

BAB IV: Pelaksanaan Program BUMDes Kalimaya

Bab ini menguraikan proses pelaksanaan program BUMDes Kalimaya, dari perencanaan hingga implementasi, termasuk manajemen, tantangan, serta kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

BAB V: Penutup

Bab ini merangkum temuan utama tentang peran BUMDes Kalimaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas program.